

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang bertugas melindungi dan menegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Unit ini bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Kehutanan. Struktur organisasi PPHLHK terdiri dari Subagian Tata Usaha, Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, dan Kelompok Kerja (PPHLHK, 2016).

Seksi Wilayah I, II, dan III bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan informasi dan edukasi terkait penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu, ketiga seksi ini bertanggung jawab atas pengumpulan bahan dan informasi, penyelidikan dugaan pelanggar hukum lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengumpulan data informasi mengenai upaya pencegahan dan keamanan ancaman hutan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Balai Gakkum LHK Kalimantan berpusat di Kota Samarinda dan mencakup seluruh provinsi di Pulau Kalimantan. Balai ini terbagi menjadi tiga seksi wilayah, salah satunya, Seksi Wilayah I, yang berlokasi di Kota Palangka Raya. Seksi Wilayah I mencakup provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan (Rencana Kerja Daerah BPPHLHK Kalimantan, 2024).

Pembangunan gedung kantor Seksi Wilayah I Palangka Raya dirancang dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain peningkatan jumlah pegawai, intensitas pelanggaran hukum yang terjadi, serta cakupan wilayah kerja yang meliputi dua provinsi dengan luas wilayah yang signifikan. Oleh sebab itu, perencanaan tata ruang yang tepat menjadi suatu keharusan guna mengoptimalkan efektivitas pemanfaatan ruang dan meningkatkan produktivitas kerja pegawai (Firda N. O., 2018).

Gedung kantor Seksi Wilayah I Palangka Raya yang saat ini digunakan masih berstatus sebagai bangunan pinjaman, sehingga memiliki keterbatasan dalam mendukung kegiatan operasional secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan

tersebut, diperlukan pembangunan gedung baru yang mampu memfasilitasi akses pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, meningkatkan mutu kinerja, serta menunjang pencapaian tujuan instansi. Selain itu, gedung baru ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat diskusi dan tempat penerimaan laporan masyarakat terkait pelanggaran hukum dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Agar tujuan tersebut tercapai, perencanaan pembangunan gedung harus dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain keamanan, efisiensi biaya, fungsi, desain arsitektur, kekuatan struktur, serta ketersediaan fasilitas penunjang (Aghani H. A. *et al.*, 2020).

Pembangunan infrastruktur perkantoran yang memadai sangat penting untuk mendukung fungsi instansi pemerintah.. Berdasarkan hasil observasi, gedung perkantoran Seksi I Palangka Raya, yang digunakan oleh Badan Penegakan Hukum Kehutanan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Daerah Kalimantan masih berstatus sebagai bangunan pinjaman, sehingga memiliki keterbatasan dalam kapasitas, kenyamanan, dan dukungan fasilitas kerja. Dengan mempertimbangkan fungsi jangka panjang, kenyamanan pegawai, serta kebutuhan ruang yang memadai untuk mendukung operasional, direncanakan pembangunan gedung baru yang lebih representatif dan modern. Keberadaan bangunan kantor yang direncanakan dengan baik tidak hanya akan meningkatkan kinerja karyawan, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan efektivitas penerapan hukum di sektor lingkungan dan kehutanan., khususnya dalam wilayah kerja yang mencakup dua provinsi besar. Dari latar belakang tersebut, judul tugas akhir yaitu “***Perencanaan Teknis Gedung Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah I Palangka Raya***”.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud penelitian untuk mengkaji perencanaan suatu bangunan yang meliputi desain struktur proyek gedung kantor. Perencanaan yang dilakukan meliputi perancangan pondasi, struktur portal, sistem ketahanan terhadap gempa, serta struktur atap. Di samping itu, penelitian ini juga berfokus pada penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penjadwalan pelaksanaan.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang pembangunan gedung kantor berdasarkan standar teknis yang berlaku, sehingga gedung yang dihasilkan dapat memenuhi aspek keamanan, fungsi, serta kelayakan operasional.

### 1.3 Lokasi Pekerjaan

Pembangunan Gedung Kantor ini terletak di Jl. RTA Milono KM. 9, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

### 1.4 Sasaran

Sasaran pekerjaan :

1. Perencanaan Desain Struktur Project berupa desain pondasi, desain struktur portal, perencanaan sistem gempa dan desain struktur atap pada Gedung Kantor.
2. Perencanaan Rencana Anggaran Biaya dalam perencanaan Gedung Kantor.
3. Perencanaan Pelaksanaan dan Penjadwalan dalam perencanaan Gedung Kantor.

### 1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah yang ada dalam perencanaan gedung perkantoran adalah :

1. Tidak merencanakan perhitungan struktur lift.
2. Tidak merencanakan perhitungan sistem MEP.
3. Tidak merencanakan perhitungan akses jalan dan drainase.
4. Tidak menghitung perencanaan struktur dan rencana anggaran biaya arsitektural seperti fasad, kanopi, taman, dan railing.
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak mencakup *critical path method* dan *recendce diagram method*.

### 1.6 Standar Teknis

Standar teknis yang dipakai untuk melaksanakan pembangunan sebagai berikut :

1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Terkait Bangunan Gedung
2. SNI 2847-2019
3. SNI 1727-2020

4. SNI 03-1729-2020
5. Surat edaran direktur jendral bina konstruksi No. 68/SE/Dk/2024 terkait Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Lampiran VI, Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya dan Perumahan
6. Peraturan Walikota Palangkaraya No. 42 Tahun 2024 Tahun anggaran 2025 terkait Standard Satuan Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2025

### **1.7 Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup pekerjaan bangunan gedung kantor sebagai berikut:

1. Mendesain Struktur Project
  - a) Desain Pondasi
  - b) Desain Struktur Portal
  - c) Perencanaan Sistem Gempa
  - d) Desain Struktur Atap
2. Menyusun Rencana Anggaran Biaya dan Penjadwalan

### **1.8 Jangka Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 10 (Sepuluh) bulan sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja, dengan jangka waktu pekerjaan yang berbeda-beda untuk setiap paket pekerjaannya.

### **1.9 Sistematika Penyusunan Proposal**

Memaparkan sistematika proposal kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun, meliputi :

**Bab 1 Pendahuluan** - Bab ini menjelaskan secara umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, lingkup pekerjaan, uraian kegiatan utama dan sistematika susunan proposal.

**Bab 2 Gambaran Umum Lokasi Studi** - Bab ini menyajikan lokasi pekerjaan, kondisi topografi, kondisi geologi dan mekanika tanah, hidroklimatologi dan kondisi sosial ekonomi pertanian dan kondisi fisik lokasi Pembangunan.

**Bab 3 Metode Perencanaan** - Bab ini berisi lingkup kegiatan, tahapan pekerjaan, pemilihan teori dasar dan standar yang digunakan, rencana kegiatan analisa, desain, penggambaran.

**Bab 4 Program Kerja** – Bab ini berisi tentang rincian kegiatan penanganan pekerjaan, tahapan pelaksanaan pekerjaan, struktur dan organisasi pelaksanaan pekerjaan.

**Bab 5 Analisis Desain** – dapat disesuaikan dengan lingkup dan TOR pekerjaan perencanaan pembangunan yang didapatkan.

**Bab 6 Jadwal Penugasan** - Bab ini berisi tentang rencana penugasan dan durasi kegiatan yang akan dilaksanakan.

